

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu cita-cita bangsa adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan, di samping untuk meningkatkan pendapatan nasional juga harus menjamin pembagian yang merata bagi seluruh rakyat. Hal ini bukan hanya dalam meningkatkan produksi saja tetapi juga untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia. Sektor perekonomian memegang peranan penting untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Hasil pembangunan ekonomi yang merata akan dapat mendukung pengusaha kecil dalam sektor perdagangan. Dalam memajukan kegiatan perekonomian tidak lepas dari dorongan berbagai pihak yang terlibat seperti BUMN, swasta, maupun pelaku ekonomi yang berskala kecil. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, kegiatan usaha mikro selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting dan cukup kuat menopang perekonomian Indonesia. Jika usaha-usaha mikro terus berkembang, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan tercapai serta diikuti dengan pemerataan.

Berkembangnya usaha mikro juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang setidaknya mampu mengurangi angka pengangguran di suatu daerah, dengan demikian usaha mikro dapat memberikan sumbangan kinerja perekonomian

bagi pemerintah daerah. Hal tersebut memberikan harapan bahwa kesejahteraan masyarakat di suatu daerah akan meningkat sejalan dengan berkembangnya usaha mikro. Pengusaha mikro seringkali menghadapi kendala dalam mengembangkan usahanya. Masalah yang sering dihadapi masyarakat dalam mengembangkan usahanya yaitu adanya keterbatasan modal.

Modal merupakan faktor utama dalam mendukung proses kinerja usaha mikro tersebut. Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak usaha mikro dalam menjalankan serta meningkatkan usahanya. Kepemilikan modal yang sangat terbatas serta sulitnya mendapatkan modal dari luar membuat semakin sulitnya usaha mikro mengembangkan usahanya. Dalam kaitannya dengan modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya, usaha mikro seringkali meminjam uang dari beberapa bank atau lembaga keuangan lainnya. Pinjaman uang tersebut hanya akan menyelesaikan masalah para pengusaha mikro untuk sementara waktu, setelah itu mereka akan menghadapi masalah baru yaitu pengembalian uang dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan konsekuensi keterlambatan membayar cicilan yang sangat berat. Hal itu akan membuat para pengusaha mikro semakin sulit mengembangkan usahanya.

Usaha pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro yaitu dengan mendirikan lembaga-lembaga pengkreditan yang dikelola oleh pemerintah, seperti koperasi unit desa (KUD), koperasi simpan pinjam, koperasi tani, dan lain sebagainya. Adanya lembaga-lembaga pengkreditan tersebut diharapkan akan memudahkan para pengusaha mikro dalam mengembangkan usaha mereka. Selain lembaga-lembaga tersebut, ada pula Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) yang

berada pada setiap kecamatan dalam lingkup kabupaten atau kota Yogyakarta. Adanya BUKP di setiap Kecamatan diharapkan para pengusaha mikro akan dengan mudah mendapatkan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya dengan syarat dan bunga yang tidak terlalu memberatkan mereka. Pemerintah mengharapkan dengan begitu para pelaku usaha mikro akan tetap berkembang, sehingga kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BUKP didirikan berdasarkan PERDA DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BUKP didirikan dengan maksud dan tujuan mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat dan murah. Dalam pelaksanaannya BUKP merupakan lembaga yang bertitik tolak atas keberhasilan lembaga bantuan Pedukuhan/Pedusunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinilai mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian pedesaan yang dapat menumbuhkan jiwa wira usaha dalam masyarakat pedesaan.

BUKP harus mengevaluasi risiko yang dihadapinya setiap hari saat memberikan pinjaman. Kebutuhan akan modal dapat diperoleh dari perusahaan-perusahaan bank. Bank memberikan kredit kepada para pedagang dan pengusahapengusaha. Dengan demikian para pedagang dan pengusaha dapat membiayai usaha yang lebih besar lagi. Kegiatan pemberian kredit oleh bank kepada para pedagang dan pengusaha-pengusaha lainnya ikut serta memperlancar

perdagangan. Sejumlah dana yang telah dikeluarkan untuk membiayai operasi perusahaan diharapkan dapat kembali masuk dalam unit usaha dalam jangka waktu pendek melalui hasil penjualan barang dagangan atau hasil produksinya.

Baru-baru ini telah dilakukan penelitian di Afrika Sub-Sahara (24 negara) mengenai determinan pinjaman bank dan melaporkan keterkaitan antara kredit bank dan kekuatannya dengan mengambil data sekunder dari 264 bank (Amidu, 2014). Namun, dalam penelitian ini konsep tersebut telah dipindahkan ke data primer melalui kuesioner yang diadopsi mengenai faktor-faktor penentu kinerja pinjaman (jumlah pinjaman)

Pemberian kredit perlu mendapat perhatian karena manajemen risiko kredit merupakan salah satu aspek kritis dan isu panas di antara masalah yang dihadapi oleh bank. Aspek manajemen risiko tidak hanya penting untuk keberlanjutan tetapi juga pertumbuhan sektor perbankan. Keberlanjutan dan pertumbuhan juga membawa stabilitas mata uang lokal serta ekonomi secara keseluruhan (Van Greuning & Bratanovic, 2020). Risiko kredit yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan risiko likuiditas yang mengakibatkan kebangkrutan. Kehadiran risiko di sektor keuangan juga melekat pada produk yang ditawarkan oleh mereka. Termasuk produk neraca seperti pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta *off balance sheet* seperti *letter of credit* beserta jaminan lainnya. Terlepas dari semua risiko, pinjaman merupakan proporsi yang lebih besar dari risiko kredit karena umumnya, mencapai 10-15 kali ekuitas bank (Kitua, 1996). Oleh karena itu, bisnis perbankan kemungkinan besar akan runtuh jika terjadi sedikit penurunan kualitas kredit.

Dalam beberapa tahun terakhir, risiko kredit menjadi sangat penting karena kerugian finansial besar yang dihadapi oleh organisasi keuangan internasional besar (Nikolaidou & Vogiazas, 2014). Sejak krisis keuangan, organisasi keuangan khususnya sektor perbankan komersial telah mengambil langkah-langkah khusus untuk mengurangi kerugian keuangan yang akan datang yang disebabkan oleh salah urus dalam alokasi pinjaman dan pemulihan kredit. Manajemen risiko kredit menawarkan solusi yang layak untuk tantangan tersebut.

Saat ini, manajemen risiko kredit merupakan komponen penting dari pendekatan komprehensif manajemen risiko di sektor perbankan (Arora & Kumar, 2014). Kebutuhan utama untuk manajemen risiko kredit yang layak adalah kapasitas untuk secara bijaksana dan produktif mengawasi jalur kredit klien. Untuk meminimalkan pengenalan kewajiban yang mengerikan, tabungan berlebih dan likuidasi, bank harus memiliki pemahaman yang lebih menonjol tentang kualitas anggaran klien, riwayat penilaian keuangan dan perubahan desain angsuran (Nkusu, 2011).

Manajemen kredit untuk kesepakatan pinjaman tidak berhenti sampai angsuran penuh dan terakhir telah dipulihkan (Mot et al., 2012). Oleh karena itu, ketika kondisi keuangan berubah, pendekatan kredit bank juga dapat berubah. Pada tahun 2019-2021 atau selama pandemi *Covid-19* terjadi penurunan jumlah nasabah yang mengambil pinjaman di BUKP Kabupaten Gunungkidul. Sejak tahun 2019-2021 atau selama masa pandemi *covid-19* berlangsung jumlah nasabah yang mengambil pinjaman di masing-masing BUKP ditiap kecamatan mengalami penurunan yakni BUKP Kecamatan Ponjong menurun rata-rata 38-53 nasabah

setiap tahunnya, BUKP kecamatan Playen menurun rata-rata 15-20 nasabah, Kecamatan Panggang menurun rata-rata 30-50 nasabah, kecamatan Rongko menurun rata-rata 17-24 nasabah, kecamatan Nglipar menurun rata-rata 100-130 nasabah, kecamatan semanu menurun rata-rata 10-15 nasabah, kecamatan Paliyan menurun rata-rata 74-83 nasabah, kecamatan Karangmojo menurun 10-15 nasabah, kecamatan Ngawen menurun rata-rata 5-10 nasabah, kecamatan Pauk menurun rata-rata 110-150 nasabah, kecamatan Wonosari menurun rata-rata 8-16 nasabah, kecamatan Saptosari menurun rata-rata 98-121 nasabah, kecamatan Tepus menurun 110-125 nasabah, dan kecamatan Gendangsari menurun 5-9 nasabah tiap tahunnya. Penurunan jumlah nasabah tersebut juga menyebabkan adanya penurunan jumlah pinjaman pada masing-masing BUKP yang kemudian berdampak pada menurunnya jumlah pendapatan pada BUKP. Penelitian saat ini mengadopsi dari penelitian terdahulu mengenai dampak praktik manajemen resiko kredit pada kinerja pinjaman di BUKP Kabupaten Gunungkidul. Adanya BUKP di Kabupaten Gunungkidul diharapkan para pengusaha akan dengan mudah mendapatkan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya dengan syarat dan bunga yang tidak terlalu memberatkan. Pemerintah mengharapkan dengan begitu para pelaku usaha mikro akan tetap berkembang, sehingga kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Tentu saja menjadi hal yang menarik untuk diteliti mengenai: **“Manajemen Risiko Kredit dan Kinerja Pinjaman pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Kabupaten Gunungkidul”**.

1.2 Rumusan Masalah

BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan) Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan jumlah nasabah yang mengambil pinjaman selama masa pandemi *Covid-19* tepatnya selama 3 tahun yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan BUKP Kabupaten Gunungkidul selama 3 tahun terakhir.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Syarat dan Kebijakan Kredit berpengaruh terhadap Kinerja Pinjaman pada BUKP Kabupaten Gunungkidul?
2. Apakah Penilaian Nasabah berpengaruh terhadap Kinerja Pinjaman pada BUKP Kabupaten Gunungkidul?
3. Apakah Kebijakan Penagihan berpengaruh terhadap Kinerja Pinjaman pada BUKP Kabupaten Gunungkidul?
4. Apakah Resiko Kredit Kontrol berpengaruh terhadap Kinerja Pinjaman pada BUKP Kabupaten Gunungkidul?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pinjaman pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Kabupaten Gunungkidul.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang berguna untuk pengembangan penelitian pada variabel lain.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi untuk mengetahui pengaruh persyaratan dan kebijakan kredit, penilaian nasabah, kebijakan penagihan, dan pengendalian risiko kredit terhadap kinerja pinjaman di BUKP. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan informasi untuk BUKP Kabupaten Gunungkidul merancang strategi dan juga informasi dalam menerapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang digunakan sebagai dasar teori yang mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi, sampel, dan

teknik penentuan sampel, definisi operasional variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, metode pengujian instrumen serta metode analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai analisis serta pengujian terhadap jawaban responden dari kuesioner yang dibagikan dan hasil yang diperoleh dalam penelitian.

Bab V: Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, implikasi manajerial serta saran yang penulis ajukan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

